BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak adalah sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang mampu mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak dengan “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Siti Resmi dalam buku Perpajakan, Teori dan Kasus (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*.

Self assesment system mewajibkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Kepatuhan membayar pajak sangat diperlukan untuk mengurangi sanksi perpajakan yang diberikan guna meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat

tinggi. Masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak.

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Titik tolak suatu kepatuhan adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak sesuai peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN ATAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan perpajakannya?
2. Seberapa jauh penerapan Sanksi Perpajakan berperan terhadap Kepatuhan menyelesaikan perpajakan wajib pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menghimpun data-data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi.

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah WPOP melakukan Perpajakannya
2. Untuk mengetahui seberapa jauh penerapan Sanksi perpajakan berperan terhadap Kepatuhan menyelesaikan Perpajakan WP

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Pihak Akademisi

Dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai peranan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas membayar pajak. Bagi peneliti lain, penelitian ini semoga dapat dijadikan referensi dan literatur bila mengambil topik dengan bahasan penelitian yang sama

2. Bagi KPP Pratama Bandung Karees

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan masukan bagi KPP Pratama Bandung Karees dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, memberikan informasi seberapa besar peranan sanksi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak.

3. Bagi Kalangan Umum atau Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan perpajakan dan memberikan pengetahuan tentang peranan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak objek pribadi untuk membayar pajak.